

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMAMATERA BARAT
TAHUN 2026

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi Ditutup
1	Biodata Elektronik PNS (Database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	5 tahun	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	5 tahun	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Daftar nilai DP-3 PNS atau SKP PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i 2. PP No 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	5 tahun	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun tentang KIP Pasal 17 huruf h	5 tahun	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	selama masa status kepegawaian aktif	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	melindungi data pribadi dari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
6	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l dan huruf j	selama proses Pengadaan Barang/Jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia. Perlindungan Hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat
7	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30-37)	selama sistem/server/IP tersebut masih aktif digunakan	Tindak Kriminal Pengrusakan, pencurian data	Melingung/ mengamankan perangkat serta data
8	Internet Protocol/IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30-37)	selama sistem/server/IP tersebut masih aktif digunakan	Penerobosan/ Penjelolan system pegaman komputer	Melindungi/menjaga hal akses
9	Bandwidth Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	selama sistem/server/IP tersebut masih aktif digunakan	Penyalahguaan kapasitas bandwidth diluar peruntukan	Mengatur kestabilan peggunaan bandwidth
10	Kode akses elektronik dan user akses/password	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	selama sistem/server/IP tersebut masih aktif digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer

11	Sistem Keamanan Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik/ITE (pasal 1 angka 16)	selama sistem/server/IP tersebut masih aktif digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Akses
12	Sistem Manajemen Database	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	selama data base tersebut masih aktif digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Data Base
13	Arsip Digital Data Pribadi Pemohon Izin Pendirian dan Operasional Sekolah meliputi : KTP Pemohon Izin; PBB tahun terakhir; NPWP Pribadi; Surat Bukti Pemilikan Tanah; Akta Notaris	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 16 dan Pasal 32 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 dan Pasal 16	5 Tahun	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/Mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia. Perlindungan Hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat
14	Arsip Digital Data yayasan Pemohon Izin Pendirian dan Operasional Sekolah, meliputi: ▪ KTP Pimpinan/Direktur/ Pemilik; ▪ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak); ▪ Akta Pendirian Perusahaan; ▪ Ijasah dan KTP Penanggung Jawab ▪ Surat Pengesahan Kehakiman/ Pendaftaran Pengadilan Negeri; ▪ Sertifikat Tanah, Akte Jual/Beli, sewa tanah pernyataan pemilik.	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 16 dan Pasal 32 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 dan Pasal 16	5 Tahun	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/ mengamankan data perusahaan/ badan Hukum yang bersifat Rahasia. Perlindungan Hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat
15	Arsip Digital Data Teknis Pemohon Izin Pendirian dan Operasional Sekolah, meliputi : ▪ Gambar dan/atau Photo lokasi; ▪ Gambar Rencana; ▪ Gambar Denah; ▪ Gambar Instalasi Listrik, air minum, air kotor dsb; ▪ Gambar kontruksi; ▪ Rencana Anggaran Biaya (RAB); ▪ Uraian rencana proyek yang akan dibangun; ▪ Peta lokasi; ▪ Peta penggunaan detail tanah; ▪ Peta Tata Ruang Lokasi; ▪ Peta Site Plan/Blok Plan; ▪ Rencana Tahapan Pembangunan;	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 16 dan Pasal 32 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 dan Pasal 16	5 Tahun	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/ mengamankan data perusahaan/ badan Hukum yang bersifat Rahasia. Perlindungan Hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat

16	Database perizinan, meliputi: • No. Pendaftaran; • No Izin; • Jumlah yang dibayarkan; • Tanggal dibayarkan;	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 16 dan Pasal 32 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 dan Pasal 17 huruf (b)	6 Tahun	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/mengamankan data perusahaan/ badan hukum yang bersifat rahasia, dari persaingan usaha yang tidak sehat dan atau penipuan.
17	Surat yang menurut sifatnya rahasia	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, b, l,	selama informasi tersebut masih aktif digunakan/relevan	Mengganggu proses administrasi, diplomasi, keamanan dan strategi organisasi.	Memastikan rencana kerja dan keputusan penting organisasi tetap terlindungi hingga saatnya diimplementasikan
18	Data Pribadi pelaku dan korban kekerasan di satuan pendidikan	1. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 2.UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 64 3.UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pasal 22 dan 23	Tidak Terbatas (Permanen)	Reviktimisasi, diskriminasi, menghancurkan masa depan dan mental anak akibat sanksi sosial, serta memicu hukuman pidana.	Pelindungan ini bersifat melekat seumur hidup demi mencegah dampak trauma psikososial sekunder, stigmatisasi permanen, serta untuk menjamin hak masa depan anak agar dapat direhabilitasi dan kembali ke masyarakat
19	Data Pribadi satgas dan tim pencegahan serta penanganan kekerasan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 dan Pasal 17 3.UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pasal 22 dan 23	Tidak Terbatas (Permanen)	ancaman, intimidasi, tekanan kepada anggota tim, mengganggu penanganan kasus	Melindungi keselamatan fisik dan mental anggota tim dari ancaman, intimidasi, atau aksi balas dendam pihak terlapor